

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya internet menghadirkan inovasi baru di kalangan pemerintah untuk mengubah pola pelayanan publik yang awalnya tradisional menjadi lebih fleksibel dan efisien dengan model *e-government* karena masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Munculnya kebijakan *e-government* tertuang dalam bentuk Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membangun *website* resmi yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi daerah dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat hingga akhirnya mampu menjadi *good governance*.

Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini pada intinya mengamanatkan kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik, kecuali informasi tertentu yang menyangkut ketahanan negara. Pada pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap badan publik harus mengungkapkan informasi publik secara berkala dengan cara yang mudah di jangkau, salah satunya mengenai informasi keuangan.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan informasi keuangan (Prasasti *et al.*, 2017). Pengungkapan merupakan tahap akhir dalam proses akuntansi. Tingkat pengungkapan informasi berkaitan

dengan seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Pengungkapan informasi keuangan melalui *website* merupakan salah satu bentuk pengungkapan dalam pelaksanaan *e-government* yang dikenal dengan istilah *Internet Financial Reporting* (IFR). Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, tanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang dapat diakses dengan cepat, efisien, dan mudah dijangkau.

Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang mengamanatkan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mencegah korupsi yang dalam lampirannya dijelaskan mengenai aksi Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penanggung jawab. Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, Kemendagri mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi Mendagri memerintahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi yang memuat 12 dokumen meliputi: ringkasan RKA SKPD; ringkasan RKA PPKD; rancangan perda APBD; rancangan perda perubahan APBD; perda APBD; perda perubahan APBD; ringkasan DPA SKPD, ringkasan DPA PPKD; LRA SKPD; LRA PPKD; LKPD yang telah diaudit; opini audit.

Namun, pada kenyataannya tidak semua pemerintah daerah menjalankan apa yang diinstruksikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ tahun 2012. Banyak pemerintah daerah yang masih menganggap informasi keuangan merupakan sesuatu yang bersifat rahasia untuk dipublikasikan kepada

publik (Alwahidi & Darwanis, 2019). Kholifah (2019) menyebutkan bahwa pada tahun 2018, dari 508 kabupaten dan kota hanya 208 yang memiliki menu TPAD, sedangkan yang lain tidak memiliki menu TPAD. Koordinator Forum Transparansi Pengelolaan Anggaran (FITRA) mengemukakan bahwa sejak diberlakukannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ tahun 2012 hingga saat ini (2019), sejumlah daerah belum mematuhi instruksi tersebut. Berdasarkan fakta yang ditemukannya, banyak pemerintah daerah belum mempublikasikan informasi keuangannya di *website* resmi masing-masing pemerintah daerah padahal pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan (www.kumparan.com).

Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 143,26 juta jiwa. Pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari 264,14 penduduk Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengungkapkan informasi keuangan melalui *website* oleh pemerintah daerah, di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, ukuran pemda, opini audit, dan kompleksitas pemda.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah dapat menambah kekayaan bersih daerah. Salah satu komponen pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri,

meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain yang dipungut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang harus diungkapkan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Semakin tinggi PAD, keinginan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada publik akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Firly *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR), namun tidak dengan penelitian Wilopo (2017) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Belanja daerah juga merupakan salah satu komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus diungkapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ tahun 2012. Belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan memberikan fasilitas yang layak (Alhajjriana *et al.*, 2017). Belanja daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggaran untuk kepentingan publik dengan maksimal. Semakin tinggi belanja daerah, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi keuangan suatu pemerintah daerah. Hasil penelitian Alhajjriana *et al.* (2017) dan Firly *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) sedangkan hasil penelitian Wilopo (2017) mengungkapkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Ukuran Pemda dapat dilihat dari besarnya aset daerah (Nosihana & Yaya, 2016). Aset daerah merupakan salah satu komponen neraca ada. Semakin besar aset yang dimiliki pemerintah daerah menandakan semakin besar juga ukuran

pemda tersebut. Ukuran pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula. Total aset yang tinggi akan membuat pemerintah daerah ingin menyampaikan informasi keuangannya kepada publik agar publik menilai bahwa kinerja manajemen pemerintah daerah baik. Penelitian Firly *et al.* (2019), Utomo & Aryani (2016), dan Nosihana & Yaya (2016) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Berbeda dengan penelitian Wilopo (2017), Naopal *et al.* (2017), dan Idris *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran pemda tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Opini audit dapat dijadikan alat pengukur kinerja dari suatu pemda apakah kualitas akuntabilitas keuangannya baik atau tidak. Pemerintah daerah yang mendapatkan hasil opini audit WTP dari BPK menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik. Semakin baik hasil opini audit BPK, semakin tinggi keinginan pemerintah daerah untuk mempublikasikan informasi keuangannya agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja pemda tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naopal *et al.* (2017) dan Prasasti *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR), namun tidak dengan penelitian Nosihana & Yaya (2016), Idris *et al.* (2018), dan Utomo & Aryani (2016) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Kompleksitas pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan jumlah penduduk suatu pemda. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 jumlah penduduk dapat menentukan besarnya pembiayaan yang dibutuhkan suatu pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula pembiayaan yang

dibutuhkan. Pembiayaan yang besar membuat pemerintah daerah berkeinginan untuk mengungkapkan informasi keuangannya kepada publik untuk menghindari adanya kecurigaan publik terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jimoh & Okoye (2016) yang mengungkapkan bahwa kompleksitas pemda (jumlah penduduk) berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR), namun tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhajjriana *et al.* (2017), Wilopo (2017), Naopal *et al.* (2017), dan Firly *et al.* (2019) yang mengungkapkan bahwa kompleksitas pemda (jumlah penduduk) tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Firly *et al.* (2019) yang terdiri dari empat variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Ukuran Pemda dan Kompleksitas Pemda dengan menambah satu variabel independen yaitu opini audit sebagai kontribusi dalam penelitian ini. Penambahan variabel opini audit didasari dengan meningkatnya pemda yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada periode 2018 sebesar 6% dibanding dengan periode 2017. Pada dasarnya, pemerintah yang menerima opini audit WTP dari BPK akan berkeinginan untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat untuk memperoleh kepercayaan dengan mengungkapkan informasi keuangannya dalam *website* Khasanah *et al.* (2017). Penelitian ini juga menggunakan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ tahun 2012 sebagai indikator dalam menentukan *Internet Financial Reporting* (IFR) pemerintah daerah sehingga membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Oleh karena itu,

peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)?
3. Apakah ukuran pemda berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)?
5. Apakah kompleksitas pemda berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemda terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)

4. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)
5. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pemda terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) pada kabupaten dan kota di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah: penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui pentingnya transparansi laporan keuangan kepada masyarakat sebagai stakeholder.
2. Bagi Peneliti: penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan ajar untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia.
3. Manfaat Lainnya: penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.